

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi kendala yang merenggangkan hubungan Qatar dengan negara tetangganya, utamanya Arab Saudi dan UAE, baik dalam format GCC ataupun bilateral, serta Mesir. Kemenangan Muhammad Morsi dan Freedom and Justice Party (FJP), partai yang berisi orang-orang IM, dalam pemilihan umum Mesir pasca jatuhnya Husni Mubarak, pada mulanya dipandang sebagai kesempatan emas bagi Qatar. Dukungan penuh diberikan oleh Qatar, baik secara moril ataupun materil. Sementara itu, negara-negara teluk yang lain memberikan sikap berbeda terhadap gerakan IM dan keterlibatannya dalam Arab Spring. Dalam sebuah sesi wawancara dengan majalah Atlantic, Raja Jordan, Raja Abdullah, menanggapi terjadinya Arab Spring dengan sebuah kekhawatiran dan mengatakan, “sebuah ‘bulan sabit’ Ikhwanul Muslimin berkembang di Mesir dan Turki,” sebuah ‘bulan sabit’ yang disorot Arab Spring. Dia menambahkan IM adalah organisasi yang dijalankan oleh ‘serigala berbaju domba’ dan harus dicegah dari mendapatkan kekuasaan dimanapun dalam kawasan (Baskan, 2016, hal. 125). Jordan tidak sendiri, kebijakan *containment* terhadap pengaruh IM selama dan pasca Arab Spring juga dijalankan oleh aktor-aktor penting Timur Tengah dan teluk, utamanya yang disebut di atas, Arab Saudi dan UEA. Salah satu usahanya dengan memberikan dukungan terhadap pemerintahan hasil kudeta militer yang menggulingkan Muhammad Mursi, kemudian menyatakan IM sebagai organisasi teroris kepada publik domestik dan internasional.

Dikudetanya Muhammad Mursi di Mesir tidak menghentikan kebijakan luar negeri Qatar yang terlihat pro-IM. Melalui pernyataan diplomatik, Qatar menunjukkan posisinya, yang menyangkan tindakan keras pemerintahan hasil kudeta militer kepada pendukung Mursi, dan juga penahanan Mursi sendiri, serta mengecam kebijakan pemerintah Mesir yang mencap IM sebagai organisasi teroris.

Melalui media al-Jazeera, yang berbasis di Qatar, persoalan tentang IM juga mendapatkan porsi tayang banyak. Qatar juga memberikan suaka kepada pendukung Mursi yang melarikan diri. Secara garis besar, dukungan Qatar kepada IM secara diametris sangat bertentangan dengan tanggapan kawasan terhadap Arab Spring di negara teluk yang lain (Ulrichsen, 2014, hal. 154). Pukulan awal paling keras dialami Qatar pada Maret 2014. Tiga negara teluk, Arab Saudi, UEA, dan Bahrain, menarik duta besarnya dari Qatar. Tuduhannya, selain Qatar telah mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, seperti dikutip dari laporan al-Jazeera tertanggal 10 April 2014 dalam Baskan (2016, hal. 127), Qatar juga telah mendukung sebuah organisasi (IM) yang merupakan sebuah ancaman bagi “keamanan dan stabilitas” negara-negara GCC. Saat itu Qatar mendapati diri terisolasi. Ketiga negara yang menarik duta besarnya, baru bersedia untuk mengirim kembali serta memperbaiki hubungan dengan Qatar pada November 2014 setelah adanya usaha pertemuan antar perwakilan negara dalam lingkup GCC (al-Jazeera.com, 17 November 2014).

Layaknya *de ja vu*, tiga tahun berselang Qatar mengalami hal yang sama dengan konsekuensi yang lebih berat. Arab Saudi, UEA, dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni 2017 (bbc.com, 19 Juli 2017). Tindakan kali ini lebih berat, karena tidak hanya berada pada tingkat *high politics*. Ketiga negara tersebut memberikan waktu 14 hari kepada warga negara Qatar untuk meninggalkan wilayah mereka dan melarang warga negara mereka sendiri untuk berpergian atau berada di Qatar. Ditambah lagi, ketiga negara tersebut, plus Mesir, menutup wilayah udara mereka dari penerbangan pesawat dan maskapai Qatar, bahkan mengharuskan penerbangan dari maskapai asing lain dengan tujuan atau berangkat dari Qatar, harus meminta izin terlebih dahulu jika akan melewati ruang udara mereka. Arab Saudi juga menutup satu-satunya perbatasan darat yang dimiliki Qatar dengan negara tetangganya, serta melarang kapal dengan bendera Qatar atau yang melayani urusan Qatar untuk berlabuh. Pengaruhnya langsung dirasakan masyarakat Qatar, apalagi di tengah tingginya interdependensi antara

negara-negara teluk. Tidak lama setelah pengumuman keputusan hubungan tersebut, masyarakat memadati supermarket karena khawatir akan terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok. Bandara Internasional Hamad di Doha sepi, Qatar Airways, maskapai penerbangan negara, harus membatalkan 18 penerbangan ke kota-kota kawasan dan mengubah rute banyak penerbangan internasional yang lain. Empat pekan pertama setelah keputusan hubungan berlaku, pasar saham Qatar anjlok hingga 10%, atau sekitar 15 triliun dolar AS. Tidak heran jika kejadian ini disebut sebagai Krisis Diplomatik Qatar.

Ironisnya, tuntutan yang dilayangkan kepada Qatar tidak jauh beda dengan yang terjadi pada 2014. Dari 13 poin tuntutan yang diajukan ketiga negara pemutus, BBC (www.bbc.com, 19 Juli 2017) merangkum dua sebab utama yang melatarbelakangi kemarahan negara pemutus kepada Qatar, yaitu pertama hubungan dekatnya dengan Iran, dan kedua dukungannya kepada kelompok-kelompok *Islamist*, utamanya IM. Tanggapan pemimpin Qatar, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Mohammad bin Abdul Rahman al-Thani, dikutip oleh BBC (www.bbc.com, 19 Juli 2017), bahwa jika tetangganya “menuntut kita harus menyerahkan kedaulatan kita,” dengan penekanan ia lanjut mengatakan “tidak akan.” Dua kali kejadian dengan tuntutan yang sama, bahkan yang terakhir berdampak hingga akar rumput kehidupan masyarakat, pertanyaannya ada apa dengan Qatar dan IM, hingga Qatar bersikeras tidak mengubah hubungannya dengan IM seperti yang diminta oleh para tetangganya.

B. Rumusan Masalah

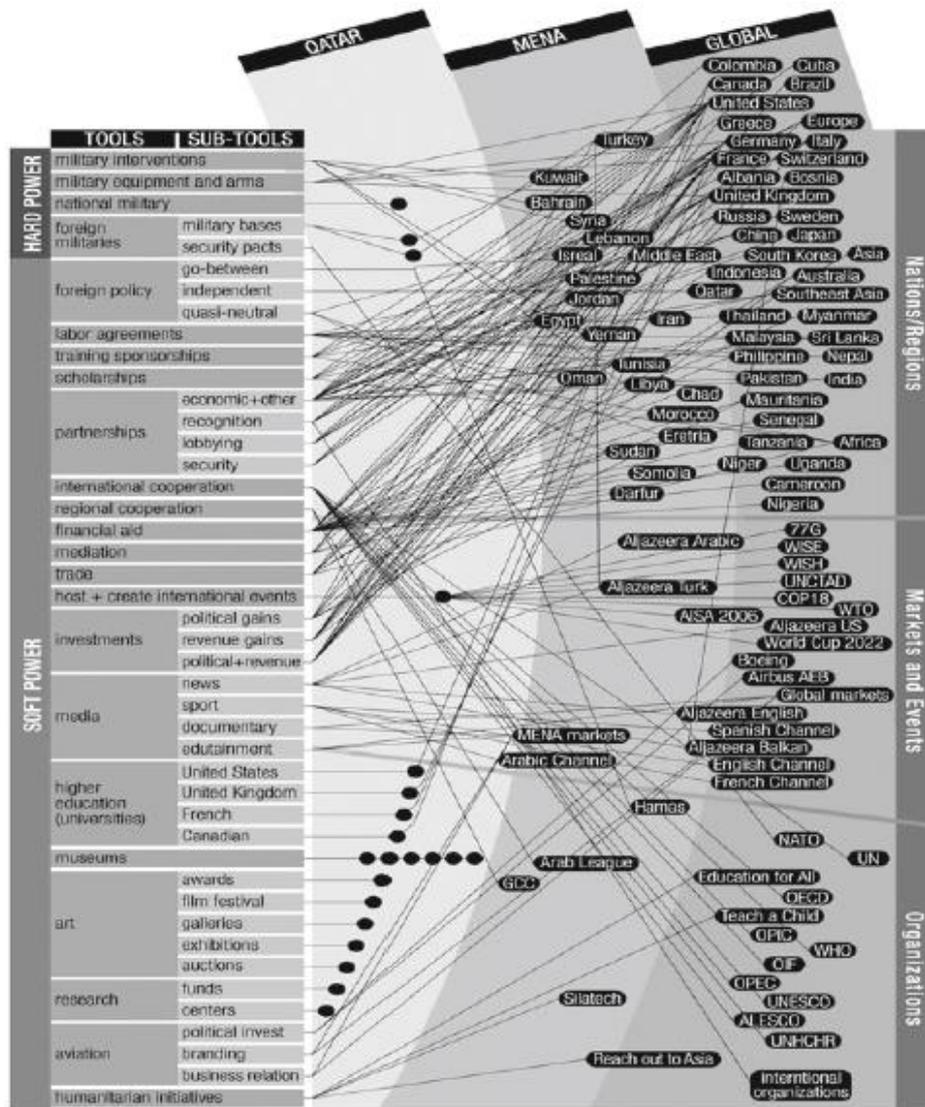
Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada pembahasan ini yaitu “**Mengapa Qatar terus mempertahankan relasinya dengan Ikhwanul Muslimin?**”

C. Kerangka Berpikir

Nested Power Theory

Maksud Nested Power di sini adalah kemampuan sebuah negara untuk menggunakan berbagai macam alat-alat dan sumber daya-sumber daya, pada tingkat domestik, regional, dan internasional, dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka demi mendapatkan hasil tertentu (Al Horr dkk., 2016, hal. 348). Definisi tersebut memperlihatkan dua aspek dari *nested power*, yaitu alat-alat dan sumber daya-sumber daya, atau kekuatan (*instrument of power*); dan tingkat interaksi (*level of interaction*) yang terbagi menjadi tiga, lokal, regional, dan internasional. *Instrument of power* yang menyusun *nestedness* suatu negara dapat bervariasi, mencakup *hard power* dan *soft power*. Beberapa rupa varian kekuatan tersebut misalnya, intervensi militer, perjanjian keamanan, jual beli senjata, pengadaan pangkalan militer, investasi, kebijakan luar negeri, media, penerbangan, *event* internasional, perjanjian buruh migran, pendidikan, penelitian, seni, *sponsorship*, beasiswa, pelatihan, mediasi, bantuan finansial, kerjasama internasional, *partnership* dan aliansi, olahraga, kerjasama regional, *entertainment*, penghargaan, *branding*, perdagangan, dan *lobbying*. Bagi Qatar, seperti yang dituliskan Al Horr dkk. dalam *Policy Making in a Transformative State, the Case of Qatar* (2016, hal. 363), kebijakan Qatar dengan mengandalkan *nested power*-nya menggambarkan bagaimana pemerintah Qatar telah secara strategis berinvestasi dalam beberapa alat-alat kekuatan (*power tools*) tertentu dan menggunakan mereka secara independen dan interdependen untuk membuat sebuah masyarakat yang modern, progresif, dan unik.

Interaksinya dengan tiga tingkat yang berbeda juga mencerminkan bagaimana kepentingan-kepentingan yang bervariasi tergantung pada ruang lingkungannya. Menurut Al Horr dkk. (2016, hal. 354), prestise dan pengaruh yang telah dibangun Qatar selama bertahun-tahun adalah hasil langsung kemampuan pemerintah Qatar menggunakan beberapa instrumen kekuatan yang berbeda, dengan tujuan untuk menciptakan imej dan *branding* negaranya dan



Gambar 1.2 Model teori *nested power* (Al Horr dkk., 2016, hal. 356)



Gambar 1.3 Model teori *nested power*.

memperlihatkannya ke seluruh dunia. Lebih lanjut, Al Horr dkk. (2016, hal. 354)

kembali mendefinisikan *nested power* sebagai penggunaan beberapa alat dan sarana, pada semua tingkat, dan memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan multi-dimensi mencakup *branding*, *positioning*, *attracting*, dan *hedging*. *Branding* sendiri di sini memiliki maksud yang sama dengan istilah *branding* pada praktek pemasaran, tapi dengan negara sebagai objeknya, bertujuan untuk membuatnya dikenal luas. *Positioning* maksudnya adalah menempatkan atau mengatur posisi suatu negara dalam konteks politik internasional. *Attracting* adalah memikat atau menarik subjek-subjek lain untuk berinteraksi. *Hedging* yaitu mengikat, dalam arti hubungan erat dengan salah satu aktor interasional tertentu. Melalui *nested power*, dimungkinkan untuk memahami bagaimana suatu negara dapat menjalin hubungan dengan berbagai macam aktor-aktor internasional, walaupun antar aktor-aktor tersebut ada yang saling berkonflik.

Salah satu contoh bagaimana Qatar menerapkan *nested power*-nya dapat dilihat misalnya dalam penggunaan media sebagai *tools*, dalam wujud kantor berita al-Jazeera. Samuel-Azran mendiskripsikan munculnya kantor berita al-Jazeera pada 1996 adalah sebuah contoh nyata sebuah *soft power tool* yang secara strategis diimplementasikan dan diinvestasikan oleh Qatar, sebagai sebuah cara untuk membentuk strategi diplomasi publik yang mencerminkan nilai dan norma negara Qatar (Al Horr dkk., 2016, hal. 357). Kehadiran al-Jazeera di tengah kondisi regional Timur Tengah saat itu berpengaruh besar dalam mengubah pemahaman tentang media dan kebebasan pers di negara-negara Arab. al-Jazeera menawarkan pemberitaan yang berlandaskan pada prinsip kebebasan berpendapat, demokrasi, dan transparansi, yang ketika itu tidak didapatkan oleh publik Timur Tengah. Saluran berita dari Qatar ini dengan cerdas dibuat untuk beroperasi sebagai *power tool* ganda (Al Horr dkk., 2016, hal. 358). Maksudnya di satu sisi al-Jazeera dapat tampil sebagai aktor yang independen dan kredibel, diwujudkan salah satunya melalui peliputan-peliputannya yang berpihak pada rakyat di kawasan Timur Tengah; dan di sisi lain al-Jazeera juga secara efektif meningkatkan prestise dan kredibilitas negara Qatar dalam komunitas internasional lewat pandangan dan

pengaruhnya terhadap politik di Timur Tengah. Lewat al-Jazeera pula, memunculkan citra masyarakat Qatar sebagai sebuah masyarakat yang progressif, berdedikasi pada nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Kasus al-Jazeera ini memperlihatkan bagaimana perubahan yang dialami oleh Qatar dengan menawarkan kebebasan yang modern kepada rakyatnya dan kawasan sekitarnya dalam bentuk informasi dan kebebasan berpendapat (Al Horr dkk., 2016, hal. 358).

Dalam konteks rumusan masalah sebelumnya, pembahasan ini bermaksud membuktikan bahwa IM adalah bagian dari *nested power* yang dimiliki Qatar. Terlebih dahulu dengan mengkategorikan IM ke sebagai *tools*. Klasifikasi ini dapat terjadi karena kemampuan Qatar untuk merangkul IM ke dalam jaringannya merupakan salah satu dari investasi politiknya. Faktanya tidak semua negara dapat melakukan seperti apa yang Qatar lakukan, memberikan ruang-ruang gerak bagi IM. Kemudian dengan mengkaji seberapa penting IM bagi Qatar dalam tiga tingkat interaksi, lokal, regional, dan internasional. Pada tingkat lokal, pembahasan akan berkaitan dengan bagaimana IM berpengaruh dalam kehidupan politik pemerintahan dalam negeri Qatar, sosial kultural masyarakat Qatar, serta pembangunan nasional (*nation building*) yang dicanangkan pemerintah. Di tingkat regional, analisa akan berfokus pada posisi strategis IM dalam kepentingan nasional Qatar di kawasan Timur Tengah. Kemudian pembahasan di tingkat internasional berisi tentang pengaruh IM dalam kepentingan nasional Qatar secara global. Hasil pengkajian pada tiga tingkat interaksi ini sendirinya akan menjawab mengapa Qatar bersikeras mempertahankan hubungannya dengan IM. Selain itu, sesuai dengan pembahasan Al-Horr dkk., maka pengkajian tentang hubungan Qatar dan IM juga tidak terlepas dari tujuan *branding*, *positioning*, *attracting*, dan *hedging*. Memasuki akhir pembahasan di tiap tingkatannya, salah satu dari keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kesimpulan.

D. Hipotesis

Alasan Qatar masih mempertahankan hubungannya dengan IM sejak pasca-Arab Spring hingga Krisis Diplomatik, jika ditinjau sementara menggunakan teori *nested power*, maka didapatkan sebagai berikut:

1. Dari dalam negeri, Qatar membutuhkan IM untuk mengisi pos-pos strategis terutama di bidang pendidikan.
2. Masih dari dalam negeri, Qatar juga memerlukan IM untuk menjaga stabilitas politik di sana.
3. Dari regional, jaringan IM yang luas dan komprehensif merupakan modal berharga bagi Qatar untuk dapat berdiri sendiri dalam menentukan dan meraih kepentingan nasionalnya di kawasan.
4. Secara global, IM, kader-kadernya, dan jaringannya diperlukan oleh Qatar untuk membantu meningkatkan *international branding*-nya terutama pada komunitas muslim di belahan dunia sebagai negara yang peduli pada ummat Islam.

E. Metode Penelitian

Pembahasan pada kesempatan kali ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Salah satu ciri khas metode penelitian kualitatif misalnya yang didefinisikan oleh Strauss dan Corbin dalam Afrizal (2014, hal. 12), yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Lebih jauh, Afrizal (2014, hal. 13) sendiri mendefinisikan metode ini sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Sebagai konsekuensi dari penggunaan metode penelitian kualitatif, seperti telah disinggung dalam definisi di atas, maka data yang dikumpulkan dan diproses bukanlah angka-angka. Sifat data yang dikumpulkan pada dasarnya berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia atau kelompok sosial. Jenis datanya adalah

kata-kata atau perbuatan-perbuatan tersebut yang telah dicatat atau dikumpulkan. Cara data dianalisis adalah dengan mencari atau membangun pola, dan dilakukan mulai saat pengumpulan data sampai saat penulisan laporan penelitian (Afrizal, 2014, hal. 15).

Kesesuaian antara topik yang diangkat dengan metode penelitian yang digunakan terdapat pada penekanan Afrizal, dalam definisinya, tentang ‘metode penelitian ilmu-ilmu sosial’. Topik yang dibahas, yaitu “Analisis Hubungan antara Qatar dan Ikhwanul Muslimin Pasca-Arab Spring hingga Krisis Diplomatik 2017”, merupakan pembahasan yang termasuk ke dalam lingkup studi Hubungan Internasional, yang mana adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial. Kemudian terkait dengan teknik pengumpulan data, pemilihannya, seperti juga yang disinggung oleh Afrizal (2014, hal. 20), menggunakan teknik yang memungkinkan untuk mendapatkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia sebanyak-banyaknya. Pilihan dalam pembahasan kali ini adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen (tulisan-tulisan). Maksudnya adalah pengumpulan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat-menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan, termasuk juga janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu yang tercatat (Afrizal, 2014, hal. 21).

F. Jangkauan Penelitian

Pembahasan kali ini akan fokus pada rentang waktu antara 2010 hingga 2018. Dimulainya rentang waktu pada 2010 dikarenakan tahun tersebut bertepatan satu tahun sebelum diawalinya Arab Spring, yaitu sekitar 2011 hingga 2013. Dipilihnya 2010 juga bertujuan untuk menambah kelengkapan pemahaman soal pra-kondisi terjadinya Arab Spring, termasuk di dalamnya bagaimana hubungan Qatar dan IM sebelum terjadinya fenomena tersebut. Kemudian 2018 dipilih sebagai batas rentang waktu karena bertepatan setahun setelah terjadinya Krisis Diplomatik Qatar. Krisis tersebut, seperti yang sudah dibahas pada latar belakang,

merupakan puncak keresahan negara-negara tetangga Qatar terhadap berbagai aktivitasnya, terutama hubungannya dengan IM.

G. Tujuan Penelitian

Pembahasan ini memiliki beberapa tujuan berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mengetahui hubungan antara Qatar dan IM.
2. Mengetahui kepentingan Qatar terhadap IM.
3. Memberikan pandangan kritis terhadap hubungan Qatar dan IM selama pasca-Arab Spring hingga Kritis Diplomati Qatar 2017.

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang sejarah hubungan Qatar dan IM. Dalam bab ini juga akan dibahas secukupnya tentang sejarah awal IM. Fokus utama terletak pada awal kehadiran IM di Qatar, kemudian beralih pada perkembangannya hingga saat ini.

Bab III menjelaskan reaksi negara-negara tetangga Qatar terhadap kehadiran IM. Hal ini penting untuk dibahas karena reaksi tersebut juga menjadi latar belakang dari kasus-kasus merengangnya hubungan Qatar dengan negara tetangganya seperti yang terjadi baru-baru ini.

Bab IV akan berisi jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, maka bab ini akan berisi tentang analisa hubungan Qatar dan IM. Penerapan teori juga akan dilakukan pada bab ini untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V merupakan kesimpulan. Berisi kesimpulan dari pembahasan keseluruhan bab yang terdapat dalam kajian ini. Di dalam kesimpulan ini juga, jawaban dari rumusan masalah akan dipaparkan.